

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ahlus Sunnah Waljamāh (Aswaja) lahir mewarnai alur sejarah peradaban dan pemikiran Islam yang tentunya tidak berangkat dari ruang kosong. Aswaja adalah sebuah *stereotipe* yang muncul dan sengaja dikembangkan oleh umat Islam untuk menjadi rujukan personifikasi golongan yang akan mendapat kemulyaan disisi Allah dengan segenap kepatuhan yang ditujukan pada Rasulullah SAW.

Lebih tepatnya Aswaja merupakan istilah paska kenabian. Ia lahir paska era kenabian yang ditandai dengan tercerai-berai komunitas Islam menjadi skisma aliran (*scism*) yang tidak tunggal. Masing-masing mengidentifikasi diri sebagai pengikut Nabi yang paling tepat dibandingkan dengan lainnya. Sungguhpun istilah ini lahir pasca era kenabian, namun, istilah tersebut selalu saja dipautkan pada sebuah tradisi dalam momen sejarah Islam paling awal yaitu generasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terpercaya.¹

Atas dasar inilah definisi Aswaja mengacu dan diacukan pada “*apa yang saya (Nabi) dan para sahabatku lakukan*” (*mā ana ‘alaihi wa aṣḥābī*).² Ini artinya Aswaja diukur dengan sejauh mana tradisi dan kebiasaan Nabi dan para sahabat

¹ Tgk. H. Z. A. Syihab, *Akidah Ahlussunnah waljamāh*, hal 14

² *Ibid*, hal 12

terpercaya mewarisi dan mewarnai kerangka berfikir dan bertindak sehingga tindakan dan pemikiran itu ada pada jalur yang tepat.

Dalam perkembangannya, identifikasi identitas itupun mengkristal pada dua ujung yang ekstrim: “kelompok yang selamat (*al-firqah an-nājiyah*) dan kelompok yang sesat (*al-firqah al-ḍalālah*)”. Dengan berlandaskan pada hadist tentang perpecahan umat maka Ahlus Sunnah mendakwahkan dirinya sebagai *firqah* yang tepat dan selamat. Dalam bingkai semacam ini ‘yang lain’ akan mudah di tuduh dan distigma sesat oleh otoritas yang berkuasa.

Berkembangnya hadist “*sataftariqu ummatī ‘ala ṣalāsatin wa sab‘īna firqatun, kulluhum fi an-nār, illā wāhid*” ditengah umat Islam dan memberi rujukan akhir pada tipologi istilah *Ahlussunah wa al-jamā’ah* yang dijelaskan dengan *mā ana ‘alaihi wa aṣḥābih*. Kelompok inilah yang secara ideal akan mampu memberikan jawaban terhadap segala macam persoalan dunia akhirat dari umat Islam, alasannya karena golongan ini mengklaim bahwa mereka adalah representasi kaum yang mengadopsi pola pikir (*manhāj al-fikr*) dan nilai-nilai dasar ajaran Islam (ideologi) yang sesuai dengan kaidah perilaku Muhammad SAW beserta sahabatnya.³

Pada fase ini beberapa ulama melakukan pendekatan seksama terhadap beberapa golongan yang telah ada dan melakukan akomodasi metodologi pemikiran diantara mereka. Imam Abu Hanifah, Sofyan al-Sauri, Sofyan bin

³ Habib Mustofa, *Alur Sejarah Pemikiran Aswaja*, (Makalah Pelatihan Kader Dasar PMII 2005) hal 2

Uyainah dan Muhammad Abu Yusuf adalah beberapa tokoh yang melakukan akomodasi pola pikir antara mu'tazilah yang mendewakan akal dengan kaum jabariyah yang menafikan kekuatan akal manusia. Titik temu akomodasi pemikiran ini adalah merupakan corak pemikiran *ahlussunah wa al-jamā'ah* dikemudian hari yaitu sifat moderatisme. Beberapa tokoh lain juga mempengaruhi perkembangan Aswaja ditengah harapan umat untuk lepas dari pertentangan golongan yang terjadi.

Dalam perkembangannya, *ahlussunah wa al-jamā'ah* yang lebih dikenal dengan golongan Sunni mengalami perluasan daerah pengikut sampai Asia, termasuk Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam tersebar di Indonesia melalui jalur Gujarat dan Timur Tengah. Terlepas dari versi mana yang benar, namun harus diakui bahwa penyebaran Islam di Indonesia memiliki nuansa egaliter dan akulturatif, dalam arti bahwa nilai-nilai Islam diterima oleh penduduk lokal dengan segenap kesadaran budaya setempat sehingga *infiltrasi* dua nilai yang berbeda tersebut membentuk *stereotype* terapan praktek Islam yang sarat dengan jiwa *ukhuwah*.

Tanggal 31 Januari 1926 melalui proses perenungan panjang dari ulama tradisional, lahirlah Nahdlatul Ulama yang bertugas melakukan pengawalan terhadap tradisi Islam setempat yang saat itu banyak ditentang oleh golongan Islam reformis. Islam reformis berpandangan bahwa praktek ritual Islam yang berbau dengan adat lokal seperti *tahlil*, *khaul*, *manāqib*, dan lain-lain adalah

merupakan praktek yang lebih dekat pada kemusyrikan dan membahayakan iman umat Islam, hingga akhirnya hal tersebut harus dihilangkan.⁴ Apalagi nabi tidak pernah melakukan hal ini, artinya praktek tersebut disebut dengan bid'ah dan tidak layak dipertahankan. Dalam konteks sosio-religius seperti inilah NU lahir dan menunjukkan eksistensinya ditengah umat Islam.

NU kemudian melakukan penguatan basis gerakannya dengan melakukan kajian normatif terhadap nilai-nilai doktrin agama Islam berangkat dari khazanah Islam klasik. Sampailah pengambaraan untuk menemukan dasar pemikiran dan tindakan itu pada penilaian Aswaja sebagai ideologi dan metode berfikir gerakan NU. Alasannya adalah karena Aswaja merupakan performance kelompok Ulama yang mampu melakukan transformasi pemikiran dan tindakan yang moderat ditengah problem umat yang mejemuk, ini sesuai dengan konteks Islam Indonesia.⁵

Bentuk pemahaman keagamaan *Ahlussunah wa al-jamā'ah* yang dikembangkan NU disebutkan secara jelas dan tegas dalam AD NU Bab II tentang Aqidah/Asas pasal 3, yakni “Nahdlatul Ulama sebagai *Jam'iyah Dīniyah Islāmiyyah* beraqidah/berasas Islam menurut faham *Ahlussunah wa al-jamā'ah* dan menganut salah satu dari mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali”. Untuk bidang tasawuf yang merupakan dasar pengembangan akhlak atau perilaku kehidupan individu dan masyarakat, NU menganut paham

⁴ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, hal 24

⁵ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, hal 21

yang dikembangkan oleh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali serta imam-imam yang lain”.⁶

Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa NU mengembangkan paham *Ahlussunah wa al-jamā'ah* dalam dunia Islam, yaitu: (1) akidah; (2) syariah atau fikih; dan (3) akhlak.

Watak NU dalam pengembangan paham *Ahlussunah wa al-jamā'ah* adalah pengambilan jalan tengah yang berada di antara dua ekstrim. Kalau di lihat kembali ke belakang, sejarah teologi Islam memang banyak diwarnai oleh berbagai macam ekstrim, seperti Khawarij dengan teori pengkafirannya terhadap pelaku dosa besar, Qadariyah dengan teori kebebasan kehendak manusianya, Jabariyah dengan teori keterpaksaan kehendak dan berbuat, dan Mu'tazilah dengan pendewaannya terhadap kemampuan akal dalam mencari sumber ajaran Islam. Di sinilah Asy'ariah dan Maturidiah - dengan mengambil inspirasi berbagai pendapat yang sebelumnya dikembangkan terutama oleh Ahmad ibn Hanbal - merumuskan formulasi pemahaman kalamnya tersendiri dan banyak pengikut di seluruh dunia.

Ciri utama *Ahlussunah wa al-jamā'ah* (Aswaja) NU adalah sikap *tawassuṭ*, *i'tidāl* (tengah-tengah dan atau keseimbangan) dan *tawāzun*. Yakni selalu seimbang dalam menggunakan dalil, antara dalil *naqli* dan dalil *aqli*, antara pendapat Jabariah dan Qadariah dan sikap moderat dalam menghadapi perubahan

⁶ Ibid, hal 20

dunyāwīyyah. Dalam masalah fiqh sikap pertengahan antar “ijtihad” dan taqild buta. Yaitu dengan cara bermazhab. Ciri sikap ini adalah tegas dalam hal-hal yang *qat’iyyat* dan toleran dalam hal *ẓanniyat*.⁷

Pertemuan antara *tawassuṭ*, *I’tidāl* dan *tawāzun* ini juga mencerminkan tradisi NU yang dalam secara kultural bersikap mempertahankan tradisi lama yang baik, menerima hal-hal baru yang lebih baik, tidak bersikap apriori dalam menerima salah satu di antara keduanya dan lain sebagainya. Inilah yang di maksud adagium “*al-muḥafāzah ‘ala al-qadīm aṣ-ṣālih wa al-akhḏu bi al-jadīd al-aṣlah*”. Dengan demikian, secara konseptual NU memilih jalan moderat dan terbuka dalam mengamalkan ajaran agama.

Sejalan dengan perjalanannya NU dalam mengusung Aswaja sebagai pijakan perjuangan yang notabene sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai basis massa terbesar di Indonesia ini mempunyai cita-cita agung dalam mewujudkan *balḏatun ṭayyibatun wa rabbun gafūr* di tengah-tengah keragaman suku maupun agama.

Dalam hal ini NU dari awal kelahirannya selalu bersentuhan dengan politik praktis walaupun NU pada awal pendiriannya bukan sebuah Partai Politik melainkan sebuah jam’iyah diniyah atau organisasi sosial keagamaan. Namun, walaupun bukan organisasi politik, dimensi politik dalam aktifitas NU tidak kecil, terutama karena dalam tujuan pendiriannya sejak awal telah terkandung

⁷ Ali Maschan Moesa, *Aswaja An-Nahḏiyah*, hal 3

muatan politik, yaitu penggalangan Nasionalisme di tengah iklim kolonial saat itu.⁸

Perkembangan selanjutnya membawa NU terlibat secara langsung dalam pasang-surut kepolitikan nasional. Pada Pemilu 1971, pemilu pertama di masa Orde Baru dan pemilu kedua dalam sejarah Indonesia merdeka, NU memperbaiki prestasinya dengan menempati urutan kedua setelah Golkar, dengan meraih 18,67 % suara dan 58 kursi di parlemen. Dua tahun setelah Pemilu 1971 dilakukan penyederhanaan kepartaian di Indonesia. Sembilan partai politik yang ada disederhanakan sehingga hanya menjadi dua partai politik saja, di samping Golkar. NU, bersama Parmusi, PSII, Perti, bergabung dalam PPP. Sementara PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo, berfusi dalam PDI.

Pada fase inilah-tepatnya pada tahun 1984 pasca pemilu 1982 NU menemukan jalan *uzlah siyāsah* (lompatan politik) antara dengan menyisipkan kata-kata “tidak terikat dengan orpol maupun ormas” dalam rumusan khittahnya, supaya tekanan penguasa menjadi agak longgar. NU juga berupaya melepaskan diri dari himpitan partai-partai dari penguasa.

Sejak itulah NU konsisten dalam mengambil jarak dengan partai politik, yang sering dikatakan pula sebagai sikap netral. Sejak itu pula muncul semacam keyakinan tertentu di kalangan elite dan warga NU bahwa NU tidak akan menjadi parpol, tidak mendirikan parpol dan tidak berafiliasi dengan partai mana

⁸ Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, hal 79

pun. Sikap netral itu hingga kini benar-benar tertanam kuat menjadi alam pikiran di kalangan NU sehingga dapat dikatakan sebagai ideologi politik atau budaya politik NU.

Ideologi atau budaya itu cocok dan memperoleh ruang yang subur pada Orba yang menempuh kebijakan depolitisasi dan deideologisasi yang memberikan kekhasan pada pragmatisme politik dan matinya kekuatan sosial politik di akar rumput yang memiliki basis ideologi.

Dalam perkembangan dinamika perpolitikan di Indonesia tepatnya pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter sangat dahsyat, yang kemudian meluas pada krisis ekonomi dan politik. Krisis ini kemudian bergeser pada krisis kepemimpinan Orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada saat inilah-21 Juni 1998-Indonesia memasuki babakan baru. Sebuah babakan penting yang akan dicatat dalam sejarah, karena sejak itulah bangsa Indonesia memasuki era yang baru yang disebut era reformasi.

Era reformasi inilah terjadi *euphoria* politik yang sangat luar biasa. Pembentukan partai politik muncul dimana-mana (multipartai) dari partai yang berbasis agama, sekuler, dan antara agama dan sekuler muncul laksana jamur di pagi hari, mewarnai perpolitikan Indonesia pasca lengsernya Soeharto.

Pada momen ini tak hanya di tingkat struktur NU yang menyambut era keterbukaan. Ini bisa dilihat sehari setelah Soeharto *lengser* dari *prabon*, PBNU mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Usulan

yang bernada sama, yaitu agar PBNU membantu mewujudkan adanya satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU.

Dalam hal menyambut baik usulan dari warga NU tersebut maka PBNU pada tanggal 3 Juni 1998 mengadakan Rapat Harian *Syuriah* dan *Tanfiziyyah*. Ini kemudian yang akhirnya menghasilkan Tim Lima dan dibantu oleh Tim Asistensi.⁹

Pada pertemuan di Villa La Citra Cipanas tepatnya pada tanggal 22 Juni 1998 yang diadakan oleh Tim Lima dan Tim Asistensi, menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Kemudian pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: 1). Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, 2). Mabda' Siyasiy, 3). Hubungan Partai Politik Dengan NU, 4). AD/ART, dan 5). Naskah Deklarasi.¹⁰

Searah dengan hasil keputusan diatas maka PBNU memfasilitasi pembentukan partai politik baru yang akhirnya diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-ini terlepas dari pro-kontra di tubuh NU terkait dengan hasil Mukhtar ke 27 di Situbondo 1982 yang melahirkan satu narasi besar “kembali ke khithah”-sebagai partai satu-satunya yang dilahirkan oleh NU.

Disini ada hal yang menarik untuk diperhatikan, di tengah maraknya pendirian partai-partai baru yang berasakan Islam, justru PKB yang lahir dari tubuh NU didirikan bukan sebagai partai Islam. Dalam Anggaran Dasarnya,

⁹ Ali Anwar, *Avonturime NU; Menjajaki Konflik Kepentingan-Politik Kaum Nahdhiyyin*, h. 155

¹⁰ AD/ART PKB

tertulis bahwa PKB berasaskan Pancasila, prinsip perjuangannya dengan pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Ahlusunnah Waljamā'ah. Sedangkan sifatnya adalah kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Dari sinilah dapat ditarik sebuah kesan bahwa dari asas dan sifat PKB tersebut tercermin nilai-nilai dan alur pemikiran Aswaja (*tawassuṭ, tasāmuḥ, tawāzun, ta'ādul, dan taṭarruf*) dalam memperjuangkan hak-hak rakyat di tengah-tengah kehidupan yang serba beragam.

PKB didirikan memang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan senantiasa mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gerakan menjaga keutuhan bangsa yang di usung oleh PKB ini adalah untuk memerangi dari upaya-upaya gerakan disintegrasi bangsa. Dan dalam hal ini PKB akan menghadapinya dengan menawarkan sekian pilihan solusi yang mencerminkan nilai-nilai Aswaja.¹¹

Selain sebagai partai terbuka, PKB juga dikenal dengan sebutan partai hijau dan partai advokasi. Keputusan PKB menjadi partai hijau sebagai satu visi dan orientasi politik dilandasi oleh keinginan untuk menyelamatkan lingkungan

¹¹ Laode Ida, *9 Tahun PKB Kritik & Harapan*, h. 216

dan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini demi keberlangsungan hidup bersama dan bentuk kepedulian terhadap generasi mendatang.

Searah dengan visi tersebut PKB sebagai partai politik yang senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang menghendaki tegaknya demokrasi dan menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak-hak manusia (HAM), dan lestarnya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang di ridlai Allah SWT, semua itu bisa di perjuangkan di dalam lembaga dewan legislatif.¹² Yang mana seperti diketahui bersama fungsi dari anggota dewan terdiri dari legislasi, budget dan pengawasan. Dan fungsi ini melekat pada setiap anggota dewan baik sebagai individu maupun sebagai sub sistem seperti komisi, panggar (Panitia Anggaran) dan Pansus (Panitia Khusus) dan lain-lain. Tugas dewan juga antara lain adalah menerima aspirasi, menghimpun dan menyalurkan aspirasi sebagai kebijakan yang aspiratif.

Dalam konteks kepentingan itulah PKB Surabaya mengambil peranan penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam rangka mengawal setiap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya serta memberikan kontribusi riil untuk menguatkan lembaga legislatif di DPRD Kota Surabaya.

¹² Muhaimin Iskandar, *5 Tahun FKB DPR-RI; Menghadapi Diktator Mayoritas di Parlemen*, h. 21

Dari sini dapat dilihat uraian perjalanan Aswaja yang awalnya lahir dari perdebatan tentang teologi dan dijadikan sebagai landasan bermazhab di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) sehingga dengan laju tuntutan zaman Aswaja pun tak hanya sebagai mazhab akan tetapi sudah bermetamorfosis sebagai *manhāj al-fikr* untuk menjawab persoalan kemasyarakatan yang mana di maksud disini bagaimana Aswaja menjadi prinsip perjuangan dalam menciptakan kebijakan publik di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya 2004-2009.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk lebih memberi kepastian secara ilmiah apakah Aswaja mempunyai pengaruh atau tidak terhadap Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam penguatan Lembaga Legislatif di DPRD Kota Surabaya Periode 2004-2009.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kebijakan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam proses legislasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya 2004-2009?
2. Bagaimanakah Aswaja menganalisis kebijakan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Dalam proses legislasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya 2004-2009?

C. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang pengaruh pemikiran aswaja terhadap PKB dalam penguatan lembaga legislatif di DPRD Kota Surabaya 2004-2009.

Namun, sebelumnya penulis pernah membaca skripsi saudara Kusriyanto Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2007 yang berjudul **“Ahlussunnah Waljamā’ah Dalam Prespektif Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Aswaja dari Teologi ke Ideologi)”**¹³. Skripsi ini membahas tentang Aswaja yang pada awal kelahirannya menjadi perdebatan ke-Tuhan-an di kalangan para pemikir-pemikir Islam terdahulu. Seiring dengan laju zaman yang mengharuskan Aswaja bergeser dari pemahaman teologi menuju pemahaman sebagai ideologi. Dalam tulisan skripsi ini berpendapat bahwa dalam pandangan PKNU Aswaja tidak saja menjadi ruh dalam gerakannya, akan tetapi sebagai ideologi yang dapat membentuk karakter dan sikap politik yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Aswaja.

¹³ Kusriyanto, *Ahlussunnah Waljamā’ah Dalam Prespektif Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Aswaja dari Teologi ke Ideologi)*, 2007.

Disamping itu juga ada skripsi yang ditulis oleh Amrul Faiz Fakultas Syariah tahun 2009 yang berjudul **“Konsep Ahlussunnah Waljamā’ah Dalam Politik Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) Implikasi Politik Islam Ahlussunnah Waljamā’ah Dalam Konteks Negara Bangsa, NKRI”**¹⁴. Skripsi ini membahas tentang Ahlussunnah Waljamā’ah sebagai landasan prinsip atau nilai dasar untuk berpolitik dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan kepentingan Negara-Bangsa. Dalam tulisan skripsi ini berpendapat bahwa PKNU politik PKNU senantiasa memperjuangkan nilai-nilai Aswaja dalam menjaga NKRI.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Diperolehnya kejelasan tentang konsep pemikiran Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya 2004-2009.
2. Diperolehnya kejelasan tentang pengaruh pemikiran Aswaja pada ranah kebijakan publik (legislasi) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya 2004-2009 terhadap Fraksi Kebangkitan Bangsa Surabaya.

¹⁴ Amrul Faiz, *Konsep Ahlussunnah Waljama>’ah Dalam Politik Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) Implikasi Politik Islam Ahlussunnah Waljama>’ah Dalam Konteks Negara Bangsa, NKRI*, 2009

E. Kegunaan Penelitian

Selain untuk menambah wawasan dan intelektualitas penulis, penelitian ini juga berguna untuk:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian bagi peneliti-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema skripsi ini, khususnya pada masalah Pengaruh Pemikiran Aswaja Dalam Proses Legislasi.
2. Diharapkan juga dari kajian ini menghasilkan interpretasi atas nilai-nilai pemikiran aswaja dalam beraktifitas baik dalam bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan kebudayaan dan lain sebagainya.

F. Defenisi Operasional

Dalam upaya menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul dan isi pembahasan, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan arti kata dan istilah pokok pada judul skripsi ini sebagai berikut:

1. **Pemikiran Aswaja:** kata “pemikiran” merupakan hasil kerja intelektual¹⁵, yakni intelektual para elite politik di lingkungan Partai Politik (Parpol) Kebangkitan Bangsa (PKB) yang teroleh melalui refrensi nilai, ideologi, tendensi dan aturan-aturan. Pemikiran yang sistematis akan berubah menjadi

¹⁵ Ali Anwar, *Avonturime NU; Menjajaki Konflik Kepentingan-Politik Kaum Nahdhiyyin*, h.12

konvensi dan dijadikan legitimasi untuk membentuk tatanan nilai tersendiri, ideologi, dan peraturan.

2. **Ahlussunnah Waljamā'ah (Aswaja):** *Ahlussunnah Waljamā'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Ahlussunnah* yang berarti “penganut Sunnah Nabi Muhammad SAW” dan *Jamā'ah* yang berarti “penganut Islam *i'tiqad* jamā'ah sahabat-sahabat Nabi SAW”. Maka *Ahlussunnah Waljamā'ah* adalah kaum atau kelompok yang menganut kepercayaan sebagaimana kepercayaan yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya.¹⁶
3. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):** Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah/ 23 Juli 1998 Masehi.¹⁷ Partai ini merupakan lahir dari rahim Nahdlatul Ulama' (NU) yang bisa dilihat pada para deklaratornya yang terdiri dari: KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Mustafa Bisri, dan KH. A. Muchit Muzadi. Partai ini berasaskan Pancasila (AD PKB: Bab III: 2)¹⁸ serta dengan prinsip perjuangannya adalah dengan pengabdian kepada Allah SWT. menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah Waljamā'ah* (AD PKB: III:4). Dalam penulisan skripsi ini nantinya akan lebih ditekankan pada “**Fraksi Kebangkitan Bangsa**” sebagai

¹⁶ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan 'Aqidah Dalam Islam*, h. 191

¹⁷ Eman Hermawan, *PKB Masa Depan*, h.3

¹⁸ AD/ART PKB

mesin politik PKB dalam hal memperjuangkan kebijakan publik di dalam DPRD Kota Surabaya.

4. **Fungsi Legislatif:** Peran, kontribusi, pemikiran dan konseptual dalam rangka membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang memihak pada masyarakat umum.¹⁹
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):** DPRD sebagai lembaga legislatif Daerah yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu). Pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan dengan sistim proporsional dengan daftar calon terbuka. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Anggota DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Jumlah ini tergantung dari jumlah penduduk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota.²⁰
6. **Legislasi:** Legislasi merupakan fungsi serta hak dan wewenang lembaga legislatif (DPR/DPRD) untuk membentuk undang-undang/Peraturan Daerah yang dibahas dengan Presiden/Gubernur, Bupati, Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.²¹

¹⁹ Sirajuddin, Fatkhurrahman, zulkarnain, *Legislative Drafting*, h. 68

²⁰ Ibid, h. 69

²¹ Ibid, h. 20

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah;

1. Konsep pemikiran *Ahlusunnah Waljamā'ah* (Aswaja) sebagai *manhāj al-fikr*.
2. Pandangan Umum dan Pendapat Akhir (kebijakan) Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya 2004-2009, dalam bidang;
 - a. Kebijakan PKB Di Bidang Budgeting
 - b. Kebijakan PKB Di Bidang Pendidikan
 - c. Kebijakan PKB Di Bidang Lingkungan

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dan patokan dalam penelitian untuk memperoleh data-data yang konkrit serta berkaitan dengan tujuan permasalahan penelitian di atas ada dua sumber, diantaranya adalah:

- a. Sumber Primer
 - 1) Al-Qur'an dan Al-Hadist.
 - 2) UUD 1945
 - 3) Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, *Mabda' Syiasi* dan Jati diri Partai Kebangkitan Bangsa.

- 4) Pandangan-pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya 2004-2009 terhadap kebijakan Pemerintah Kota (PEMKOT) Surabaya.
- 5) Pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya 2004-2009 terhadap kebijakan Pemerintah Kota (PEMKOT) Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau bahkan karya ilmiah lain, antara lain:

- 1) Tgk. H. Z. A. Syihab, *Akidah Ahlussunnah waljamāh*
- 2) Said Agil Siradj, *Kontroversi Aswaja; Latar Kultur dan Politik Kelahiran Aswaja*
- 3) Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*
- 4) Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*
- 5) Ali Maschan Moesa, *Aswaja An-Nahdliyah*
- 6) Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*
- 7) Abdul Muchith Muzadi, *NU Dalam Prespektif Sejarah Dan Ajaran; Refleksi 65 Tahun Ikut NU*
- 8) Tim Penyusun DPW PKB Jawa Barat, *13 Alasan Memilih PKB*

- 9) Muhammad bin Abdul Wahab, *Bersihkan Tauhid Anda Dari Dosa Syiyirk*
- 10) Abdul Aziz, *Konsepsi Ahlusunnah Waljamā'ah*
- 11) Yusuf M. Shadiq, *Aqidah Menurut Empat Mazhab*
- 12) Hamka, *Tasawuf Perkembangan dan Pemeriksaannya*
- 13) Sirajudin, Fatkhurrahman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*
- 14) Materi Kongres XVI PBPMII 2008
- 15) Tim Pendidikan dan Pengkaderan Cabang Yogyakarta, *Draft Materi Lokakarya Pendidikan dan Pengkaderan Nasional*
- 16) Habib Mustafa, *Makalah; Alur Sejarah Aswaja*
- 17) Kaisar Abu Hanifah, *Makalah; Aswaja Dalam Penelusuran Historis*
- 18) Lakspeadam NU Jatim, *Artikel; Pro Poor Budgeting*

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini *bibliographic* dan studi lapangan, maka teknik penggalian datanya dengan cara observasi, wawancara serta mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di seputar ke-Aswaja-an yang sebagai nilai-nilai perjuangan di lembaga legislatif pada tubuh Fraksi Kebangkitan Bangsa.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.²²

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.²³ Dalam hal ini menggambarkan pemikiran aswaja terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya dalam penguatan fungsi legislaif di DPRD Kota Surabaya 2004-2009.

Dalam hal menarik kesimpulan melalui pola nalar induktif verifikatif, Yaitu bermaksud menganalisis data yang berangkat dari kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip²⁴ dari alur pemikiran Aswaja yang kemudian ditarik pada sebuah kesimpulan yang bersifat umum, yaitu analisis pemikiran Aswaja terhadap pemikiran-pemikiran PKB dalam proses legislasi di DPRD Kota Surabaya 2004-2009.

²² Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 103

²³ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, h. 58

²⁴ Ibid, h. 88

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub bab tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Pembahasan tentang Aswaja yang dirunut dari awal kelahirannya hingga terjadi penetrasi di Asia khususnya di Indonesia. Dan dalam bab ini akan juga di uraikan bagaimana kedalaman doktrin-doktrin Aswaja, karakteristik Aswaja dan berakhir pada perjalanan Aswaja sebagai nilai atau prinsip pemikiran dan perjuangan.
- Bab III : Pembahasan seputar lahirnya PKB. Dan menguraikan tentang kebijakan-kebijakan PKB Surabaya dalam proses legislasi di DPRD Kota Surabaya 2004-2009
- Bab IV : Menguraikan hasil analisis penulis tentang analisis nilai-nilai Aswaja terhadap PKB Surabaya dalam proses legislasi di DPRD Kota Surabaya 2004-2009.
- Bab V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.